

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETEPATWAKTUAN
PELAPORAN KEUANGAN**

(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pringsewu)

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY,
IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE
TIMELINESS FINANCIAL REPORTING***

(Empirical Study on SKPD Kabupaten Pringsewu)

Oleh:

Fara Deyana Arliani

faradeyana524@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alek Murtin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The research aims to examine the effect of human resources competency, implementation of local government management information system, and internal control system on the timeliness financial reporting

This research is quantitative study that use primary data. Data were collected using questionnaire survey. The questionnaires were delivered to 60 employees of local government units (SKPD) Kabupaten Pringsewu. The data analysis was done by using binary logistic with the help of SPSS 16 software.

The result showed that the human resources competency standards had a negative significant effect on timeliness financial reporting, implementation of local government management information system had a positive significant effect on timeliness financial reporting, and internal control system had a positive significant effect on timeliness financial reporting.

Keywords: *human resources competency, implementation of local government management information system, internal control system, the timeliness financial reporting.*

PENDAHULUAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran atas sumber dan yang berasal dari pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah akan di periksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menjamin keandalan atas informasi yang terkandung di dalamnya, kemudian laporan keuangan tersebut akan disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) yang nanti nya akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai dasar menilai kinerja pemerintah.

Pemerintah sebagai entitas pelapor (*reporting entity*)

berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kendali sumber-sumber yang signifikan dan penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat serta terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa komponen yang

harus dilaporkan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran,, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Pratolo, dkk 2016).

Laporan keuangan dalam penyajiannya harus disadari bahwa laporan keuangan tersebut akan dipergunakan oleh beberapa pihak, terkait dengan nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Agar informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan bermanfaat untuk para pemakainya, maka laporan keuangan harus disajikan secara tepat, baik tepat dalam penyajiannya maupun tepat waktu dalam pelaporannya.

Indikator ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia di atur dalam PP No 71 tahun 2010 dimana laporan keuangan pemerintah daerah harus diserahkan kepada BPK 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tepatnya pada tanggal 31 maret. Dengan adanya

batas waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK mengharuskan pemerintah daerah dalam memaksimalkan kinerja setiap aspek yang ada di lembaganya, jika pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan kinerjanya, maka hal ini sangat mempengaruhi opini yang akan diterimanya dari BPK terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan pemerintah daerah akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beberapa indikator yang harus terpenuhi, salah satunya adalah indikator ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Opini WTP ini kali pertama bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Lampung. Opini ini diraih berdasarkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 (Budiawan R. D 2016).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip

tepat waktu, maka kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem akuntansi sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memahami konsep akuntansi pemerintahan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iphan, dkk (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sebab jika seorang pegawai diberikan tugas sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau dapat dikatakan sesuai dengan keahliannya, maka tugas tersebut akan diselesaikan dengan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Witono (2014), Desmiyawati (2014) juga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukri (2017) dan Rachmawati (2014) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh

negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penerapan SIMDA mungkin hal lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu atas pelaporan keuangan di pemerintahan. Sistem ini dikembangkan guna membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan kegiatan pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis mulai dari penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Amiani (2014), Desmiyawati (2014), Yunina dan Wahyuni (2013) menyatakan bahwa SIMDA berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, artinya dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2014), Mustafa, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh

negative terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal terakhir yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, PP tersebut menerangkan bahwa tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan Laporan Keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut penelitian Iphan, dkk (2014) Yunina dan Wahyuni (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Witono (2014), Mustafa, dkk (2016) juga membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Sebab, jika pengendalian Internal pemerintah dijalankan dengan tepat pada setiap SKPD maka kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik, dan tentunya dengan kualitas laporan keuangan yang baik maka penyajiannya dapat dilakukan tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dilakukan pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di provinsi Lampung, sehingga penelitian ini di beri judul : **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan Sistem Pengendalian Intenal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pringsewu)”**. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Permata Sari dan Banu Witono pada tahun 2014 dengan obyek penelitian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada

obyek yang diteliti. Replikasi tersebut dilakukan karena masih banyaknya hasil penelitian yang belum konsisten.

Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan tindakan manajer yang tidak berfokus pada kepentingan individu, namun berfokus pada kepentingan organisasi. Teori *stewardship* merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Donaldson & Davis, 1991).

Bila asumsi teori *stewardship* ini diterapkan dalam manajemen suatu pemerintahan, maka pemerintah sebagai pihak yang dapat dipercaya akan melakukan apa yang telah diamanatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bentuk dari akuntabilitas publik di pemerintahan kepada para pihak yang berkepentingan.

Kegunaan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang diberi amanah untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dapat mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang diberikan serta dapat menampung aspirasi masyarakat luas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tersebar secara luas dan menyeluruh.

Teori Kompetensi

Istilah kompetensi mulai muncul pada tahun 1596. Istilah ini diambil dari kata lain "*competere*" yang artinya "*to be suitable*". Kemudian ini secara substansial mengalami perubahan dengan masuknya berbagai isu dan pembahasan mengenai konsep kompetensi dari berbagai literatur. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46 A Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Jika teori ini diterapkan dalam suatu pemerintahan maka seorang yang berkompeten akan diukur dalam 3 kategori. Kategori pertama diukur dengan tingkat pengetahuan, yang mana dalam kategori ini pengetahuan didasarkan pada tingkat pendidikan seorang individu dalam pemerintahan. Kategori kedua diukur dengan tingkat keahlian yang dimiliki, keahlian ini berupa kemampuan dalam menghasilkan sebuah *ouput* berupa laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tepat waktu. Kategori ketiga diukur berdasarkan sikap/perilaku dari pegawai yang menjalankan fungsi akuntansi, dengan sikap/perilaku yang baik diharapkan pegawai tersebut tidak akan melakukan penundaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tepat waktu dapat terwujud di pemerintahan tersebut.

Penelitian Terdahulu dan

Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Terjadinya perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berdampak terhadap basis akuntansi yang digunakan, akan tetapi juga berdampak terhadap teknis operasional penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi, laporan serta pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.

Sumber daya manusia merupakan aset atau modal penting dalam suatu organisasi. Dikatakan aset sebab sumber daya manusia terdiri atas *skill*, *knowledge* dan kompetensi seseorang yang digunakan untuk

mengembangkan *output* dari sebuah organisasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan *output* dari aktivitas di pemerintah daerah yang harus dilaporkan secara tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat tercapai apabila sumber daya manusia yang menjalankan fungsi akuntansi berkualitas dan kualitas tersebut diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*), terutama untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Sukri, 2017).

Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap aktivitas atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu maka akan berdampak terhadap nilai informasi dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pernah dilakukan Iphan, dkk (2014), Sembiring (2013), Sari dan Witono (2014). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

2. Hubungan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Sistem dalam institusi pemerintahan merupakan elemen penting guna mendukung kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem saling berkesinambungan.

Menurut Jogiyanto (2005) sistem informasi adalah data yang diolah

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi yang merupakan sumber daya strategis bagi organisasi atau suatu entitas yang mendukung kelangsungan hidup bagi organisasi. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. Sistem Informasi Manajemen Daerah dikembangkan guna membantu pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar kinerja instansi pemerintah dapat diketahui oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar hak dan kewajiban daerah dalam hal finansial dapat dimanfaatkan dengan maksimal guna kepentingan suatu daerah. Penerapan SIMDA di pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan laporan keuangan yang tepat waktu, penerapan SIMDA perlu dilakukan dengan bijak sehingga dapat mendukung pemerintah daerah mencapai tujuannya dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

Peneliti menduga bahwa dengan penerapan SIMDA di pemerintahan daerah maka ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amiani (2014) dan Iphan, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Oleh sebab itu diajukan hipotesis penelitian:

H₂: Penerapan SIMDA berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Masih banyaknya temuan mengenai penyimpangan pada

laporan keuangan pemerintah yang ditemukan oleh BPK, menggambarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan belum sesuai dengan prosedur atau unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil audit “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” yang diberikan oleh BPK diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Keuangan, 2011).

Menurut Iphan, dkk (2014) untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Unsur-unsur pembentuk SPIP antara lain: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal

Sistem pengendalian internal merupakan pengendali yang mencakup seluruh proses, sistem, dan tahap-tahap yang harus dilakukan. Sistem pengendalian internal dibuat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya agar organisasi menjadi lebih baik. Adanya sistem pengendalian internal yang baik maka organisasi akan berjalan dengan baik termasuk dalam penyajian laporan keuangannya. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik juga akan menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang tepat waktu. Artinya salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah efektivitas penerapan SPI. Peneliti berargumen bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian internal dengan

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Sembiring (2013), Desmiyawati (2014), Iphan, dkk (2014), Sari dan Witono (2014), dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer dengan populasi atau objek penelitian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pringsewu Lampung, sehingga sampel dalam penelitian ini juga merupakan SKPD di kabupaten Pringsewu yang memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh peneliti.

Teknik Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yang mana pengambilan sampel dipilih berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh peneliti. Kriteria responden yang ditetapkan oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini yaitu:

- a. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan Dinas pada SKPD yang menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA),
- b. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Data yang dipakai adalah data primer, yaitu data yang peneliti ambil langsung dari sumbernya dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Sumber yang dimaksud adalah responden. Responden diminta untuk mengisi kuisisioner yang berisi beberapa komponen pertanyaan berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan pembatasan jawaban berdasarkan skala likert dengan skala 1-5 berdasarkan tingkat kesetujuan responden.

Variabel Independen Variabel independen pada penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi

manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian internal (SPI).

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Nurillah (2014) sebagai berikut:

- a) Pendidikan
- b) Sumber daya yang memadai
- c) Peran dan tanggung jawab
- d) Pelatihan keahlian dalam tugas
- e) Pemahaman tentang Akuntansi

2) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem informasi akuntansi adalah rangkaian komponen yang saling berhubungan, diantaranya adalah orang-orang, prosedur-prosedur, dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengubah data secara manual maupun terkomputerisasi menjadi sebuah informasi yang selanjutnya akan dapat didistribusikan kepada berbagai pihak untuk membuat keputusan (Romney dan Steinbart, 2006).

Variable Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Nurillah (2014) sebagai berikut:

1. Pelaporan yang konsisten dari periode
2. Kesesuaian sistem dengan SAP
3. Pengklasifikasian transaksi
4. Laporan Keuangan setiap periode
5. Pengidentifikasian transaksi
6. Pencatatan transaksi
7. Bukti dari setiap transaksi

3) Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Efektivitas sistem pengendalian internal adalah penerapan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai apakah organisasi telah mencapai tujuannya.

Variable sistem pengendalian internal pemerintah diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Nurillah (2014) sebagai berikut:

- a) Pemisahan wewenang dalam organisasi
- b) Standard Operating Procedure (SOP)

Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Indikator pengukur variable ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

- a. Batas waktu penyerahan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

A. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang perlu untuk

diukur. Jika validitasnya tinggi maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya, sehingga data yang digunakan merupakan data yang memadai. Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS berdasarkan nilai KMO. Validitas terpenuhi apabila nilai $KMO > 0,5$ (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban responden yang diterima. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS yang dilihat dari nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 maka reliabilitas terpenuhi (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

B. Analisis Data dan Pengujian

Hipotesis Regresi Logistik

Dummy digunakan untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian ini, oleh karena itu metode regresi logistik (*logistic regression*) digunakan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap

variabel dependen. Ghazali (2016) menjelaskan bahwa uji normalitas pada variabel bebas tidak diperlukan dalam regresi logistik, oleh sebab itu uji normalitas tidak dilakukan di penelitian ini. Uji kualitas data untuk regresi logistik meliputi:

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai *mean*, *median*, *minimum*, *maximum*, dan *standar deviation* dari masing-masing variabel dalam penelitian, yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan efektivitas sistem pengendalian internal.

b. Uji Model Fit (Overall Model Fit)

Langkah awal yang dilakukan yaitu analisis keseluruhan *overall model fit* terhadap data. Hal ini berfungsi untuk menilai model yang telah dihipotesiskan fit dengan data. Untuk menilai model fit hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Fungsi *likelihood* pada statistik digunakan untuk menilai model fit dalam regresi logistik. Keseluruhan model yang dinilai dalam regresi logistik ($-2 \log \text{likelihood}$) adalah penilaian terhadap $-2 \log \text{likelihood}$. Lihat pada angka $-2 \log \text{likelihood}$ di awal blok number = 0, dan angka $-2 \log \text{likelihood}$ pada blok number = 1. Model dapat diterima apabila sesuai dengan data dan regresi yang baik dapat diidentifikasi melalui hal tersebut, yaitu apabila penurunan terjadi dalam nilai $-2 \log \text{likelihood}$ (*blok number = 0 – blok number = 1*).

c. Uji Kelayakan Model

Uji Homser dan Leweshow *Goodness of Fit Test* yang dihasilkan digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Nilai *goodness of fit test* digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang diukur dengan menggunakan nilai *Chi-Square*. Menurut Ghazali (2016) jika uji Homser dan Leweshow menunjukkan $p\text{-value} > 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang nyata antara model dengan data (model dapat memprediksi nilai data), untuk $p\text{-value} < 0,05$, maka terdapat

perbedaan yang nyata antara model dengan data (model tidak dapat memprediksi nilai data).

d. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. *Cox* dan *Snell's R square* adalah ukuran yang meniru ukuran R^2 pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* yang nilai maksimumnya kurang dari 1 (satu) sehingga tidak mudah untuk dijelaskan. *Nagelkerke's R square* adalah modifikasi dari koefisien *Cox* dan *Snell's* yang berfungsi untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai *Nagelkerke's R2* dapat dijelaskan seperti nilai R^2 pada *multiple regression* (Ghozali,2016).

e. Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi adalah tabel hasil matriks klasifikasi dimana hasil dari matriks klasifikasi ini dapat menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi yang akan digunakan. Tabel klasifikasi menunjukkan

kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilitas kualitas audit pada perusahaan. Kekuatan prediksi yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat akan dinyatakan dalam satuan persen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

1. Demografi Kuesioner Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai/staf bagian akuntansi di SKPD Kabupaten Pringsewu.

Tabel 4.1 dibawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan

pengembalian kuesioner dan juga menginformasikan tingkat pengembalian (*response rate*).

Tabel 4.1
Daftar Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	60	100
Kuesioner yang kembali	60	100
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0	0
Kuesioner yang dapat dianalisis	60	100

Sumber: Data Primer diolah oleh Peneliti (2018)

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 60 kusioner yang disebar kepada responden, kusioner yang dikembalikan kepada peneliti adalah 60 kusioner atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai *response rate* sebesar 100%, sehingga data yang dapat digunakan untuk di analisis sebanyak 60 kusioner.

2. Demografi Responden

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti. Karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan subyek penelitian sebanyak 60 orang yaitu dilihat berdasarkan lama bekerja, pendidikan terakhir, dan SKPD.

a. Responden berdasarkan lama bekerja

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan	Frekuensi	Presentase
1-10	26	43,33%
11-20	19	31,67%
21-30	11	18,33%
31-40	4	6,67%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Primer diolah oleh Peneliti (2018)

Hasil pengelompokan responden berdasarkan lama bekerja, menunjukkan bahwa responden yang lama bekerjanya paling sedikit yaitu yang mempunyai 31-40 tahun masa bekerja adalah sebanyak 4 orang dengan tingkat presentase 6,67%,

sedangkan tingkat responden yang paling lama lama bekerjanya yaitu responden yang memiliki 1-10 tahun masa bekerja sebanyak 26 orang dengan tingkat presentase 43,33%.

b. Responden berdasarkan pendidikan terakhir

Gambaran umum mengenai reponden berdasarkan pendidikan terakhir dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Frekuensi	Presentase
SMA	7	11,67%
D3	11	18,33%
S1	34	56,67%
S2	8	13,33%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Primer diolah oleh Peneliti (2018)

Hasil pengelompokan responden berdasarkan pendidikan terakhir, menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 7 orang dengan presentase 11,67%, memiliki

pendidikan terakhir D3 adalah sebanyak 11 orang dengan presentase 18,33%, memiliki pendidikan terakhir S1 adalah sebanyak 34 orang dengan presentase 56,67% sekaligus merupakan pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh, dan yang paling sedikit adalah S2 sebanyak 8 orang dengan presentase 13,33%.

B. Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana kevalidan suatu pernyataan dari penyebaran kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan *Pearson Correlation*. Suatu data dikatakan valid apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas terhadap data penelitian ini disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-tabel	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁)	P1	0,830	0,254	Valid
	P2	0,854	0,254	Valid
	P3	0,826	0,254	Valid
	P4	0,826	0,254	Valid
	P5	0,820	0,254	Valid
	P6	0,829	0,254	Valid
	P7	0,830	0,254	Valid
	P8	0,797	0,254	Valid
	P9	0,765	0,254	Valid
Penerapan SIMDA (X₂)	P1	0,867	0,254	Valid
	P2	0,843	0,254	Valid
	P3	0,930	0,254	Valid
	P4	0,799	0,254	Valid
	P5	0,800	0,254	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-tabel	Keterangan
	P6	0,866	0,254	Valid
	P7	0,892	0,254	Valid
	P8	0,896	0,254	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X₃)	P1	0,879	0,254	Valid
	P2	0,826	0,254	Valid
	P3	0,912	0,254	Valid
	P4	0,888	0,254	Valid
	P5	0,842	0,254	Valid
	P6	0,904	0,254	Valid
	P7	0,909	0,254	Valid
	P8	0,928	0,254	Valid
	P9	0,872	0,254	Valid

Sumber: Data Primer diolah oleh

Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa pengujian terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia,

penerapan sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan seluruh data yang diperoleh valid karena menunjukkan hasil r -hitung $>$ t -tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat digunakan dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dari instrument penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* berada diatas 0,70. Hasil uji validitas terhadap data penelitian ini disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabel	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,938	0,70	Reliabel
Penerapan SIMDA	0,950	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,965	0,70	Reliabel

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel kompetensi sumber daya manusia 0,938, penerapan sistem informasi manajemen daerah 0,950 dan sistem pengendalian internal 0,965. Dengan demikian disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,70.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Sesuai dengan judul penelitian, variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil statistik deskriptif dari keempat variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	60	28	45	40,93	4,258
Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah	60	24	40	35,57	4,386
Sistem Pengendalian Internal	60	24	45	39,87	5,679
Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	60	0	1	0,85	0,360
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Primer diolah oleh Peneliti (2018)

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia jawaban minimum responden sebesar 28 dan nilai maksimum adalah 45 dengan nilai rata-rata total jawaban 40,93 dan standar deviasi sebesar 4,258. Variabel Penerapan SIMDA jawaban minimum responden sebesar 24 dan nilai maksimum adalah 40 dengan nilai rata-rata total jawaban 35,57

dan standar deviasi sebesar 4,386. Variabel SPI jawaban minimum responden sebesar 24 dan nilai maksimum adalah 45 dengan nilai rata-rata total jawaban 39,87 dan standar deviasi sebesar 5,679. Variabel Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan jawaban minimum responden sebesar 0 dan nilai maksimum adalah 1 dengan nilai rata-rata total jawaban 0,85 dan standar deviasi sebesar 0,360.

2. Pengujian Model Fit (*overall model fit*)

Tabel 4.8
Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir

-2 Log likelihood	Nilai
Awal (Block Number : 0)	50,725
Akhir (Block Number : 1)	10,793

Tabel 4.8 menunjukkan nilai -2LL awal (*block number = 0*) dan nilai -2LL akhir (*block number = 1*). Nilai -2LL awal (*block number = 0*) sebesar 50,725 dan nilai -2LL akhir (*block number = 1*) sebesar 10,793. Terdapat selisih antara nilai -2LL awal dengan nilai -2LL akhir, dimana

nilai $-2LL$ awal lebih besar dari nilai $-2LL$ akhir sebesar 39,932. Adanya selisih penurunan sebesar 39,932 maka memiliki arti bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data.

D. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS. Hasil regresi logistik penelitian ini dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Hipotesis

	B	S.	W	D	S	Ex
		E.	al	f	i	p(
			d	g	B)	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,0 1	,2 19	,0 05	1	, 9	1,0 15
Penerapan SIMDA	,6 5	,3 05	4, 57	1	, 0	1,9 22
Sistem_Pengendalian_ Internal	,5 2	,2 41	4, 77	1	, 0	1,6 93

Constant	-	18	4,	1	,	,00
	3	,4	34		0	0
	8,	52	3		3	
	4				7	
	5					
	5					

Sumber: Data Primer diolah oleh

Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.13 maka model regresi logistik yang diperoleh sebagai berikut:

$$\ln \frac{RA}{1-RA} = -38,455 + 0,015KSDM + 0,653PSIMDA + 0,527SPI$$

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Berdasarkan table 4.13 maka diperoleh hasil pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai sig sebesar 0,946 > alpha 0,05. Artinya variabel kompetensi sumber daya manusia (KSDM) tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sehingga H₁ yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan **ditolak**.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Kedua (H₂)

Berdasarkan table 4.13 maka diperoleh hasil pengujian variabel penerapan sistem informasi manajemen daerah memiliki nilai sig sebesar $0,032 < \alpha 0,05$. Artinya variable penerapan sistem informasi manajemen daerah (PSIMDA) berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sehingga H₂ yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan **diterima**.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Ketiga (H₃)

Berdasarkan table 4.13 maka diperoleh hasil pengujian variabel PSIMDA memiliki nilai sig sebesar $0,029 < \alpha 0,05$. Artinya variable sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sehingga H₃ yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan **diterima**.

E. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa tidak semua variabel independen penelitian ini berpengaruh positif terhadap variabel dependen ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian

yang dilakukan Sukri (2017) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian, walaupun sistem akuntansi sudah dibangun dengan baik.

Menurut teori kompetensi, kompetensi sumber daya manusia akan diukur dalam 3 kategori, salah satu kategorinya yaitu pengetahuan (*knowledge*). Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tepat waktu dibutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan ekonomi yang baik. Tidak hanya itu, pendistribusian kuesioner juga harus dilakukan secara tepat, kuesioner harus dibagikan kepada pegawai yang menjalankan fungsi akuntansi dan berlatar belakang pendidikan ekonomi. Dalam penelitian ini tidak semua pegawai yang menjalankan fungsi akuntansi berlatar belakang

pendidikan ekonomi/akuntansi, sehingga dapat dikatakan mereka tidak berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel penerapan simda memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah telah diterapkan dengan baik di SKPD kabupaten Pringsewu, sehingga laporan keuangan dapat dilaporkan tepat waktu.

Sistem dalam institusi pemerintahan merupakan elemen penting guna mendukung kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila kerjasama diantara unsur-unsur yang

terkait dalam sistem saling berkesinambungan.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2009) salah satu tujuan dikembangkannya SIMDA adalah menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amiani (2014), Desmiyawati (2014), Yunina dan Wahyuni (2013).

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Sistem pengendalian internal dibuat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya agar organisasi menjadi lebih baik.

Adanya sistem pengendalian internal yang baik maka organisasi akan berjalan dengan baik termasuk dalam penyajian laporan keuangannya. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik juga akan menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam PP tersebut juga dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi perundang-undangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Iphan, dkk (2014), Yunina dan Wahyuni (2013) dan Sembiring (2013).

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukri (2017) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan

data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian, walaupun sistem akuntansi sudah dibangun dengan baik

- b. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah telah diterapkan dengan baik di SKPD kabupaten Pringsewu, sehingga laporan keuangan dapat dilaporkan tepat waktu.
- c. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adanya sistem pengendalian Internal yang baik maka organisasi akan berjalan dengan baik termasuk dalam penyajian laporan keuangannya. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik juga akan menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang tepat waktu.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpotensi mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah seperti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Teknologi Informasi, dan lain-lain.
2. Penelitian selanjutnya disarankan dilengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab beberapa pernyataan atau pertanyaan yang diajukan sehingga dapat mengurangi subjektivitas dari responden yang dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner tanpa dilengkapi dengan metode observasi atau wawancara,

sehingga kemungkinan besar informasi yang disampaikan responden rentan terhadap informasi bias.

2. Karena memiliki banyak kesibukan dan keterbatasan waktu, responden meminta kuesionernya untuk ditinggalkan yang pada akhirnya menyebabkan peneliti tidak dapat mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Pringsewu sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya.

